

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN MANIFESTASI KEBHINNEKAAN

**Muzakkir Walad, Muh Alawi Harun' Lalu Fauzi Haryadi**

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur

Email: [muzakkirwalad75@gmail.com](mailto:muzakkirwalad75@gmail.com)

**Abstrak:** Pendidikan multikultural merupakan keanekaragaman budaya yang terdiri dari keragaman Agama, bahasa, ras, suku, dan budaya. Indonesia banyak memiliki falsafah yang berbeda-beda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu bangsa Indonesia yang kuat, kokoh, damai, tentram, adil, makmur, sejahtera, dan dihargai oleh bangsa lain. Banyak tokoh yang mendefinisikan tentang pendidikan multicultural, diantaranya: Muhaimin el Ma'hady yang dikutip oleh Choirul Mahfud, Mundzier Suparta, dan H.A.R Tilaar. Perkembangan Multikulturalisme: (1) multikulturalisme dalam konteks perjuangan pengakuan budaya yang berbeda; dan, (2) multikulturalisme yang melegitimasi keragaman budaya, dan mengalami beberapa tahapan, diantaranya: kebutuhan atas pengakuan, melibatkan berbagai disiplin akademik lain, pembebasan melawan imperealisme dan kolonialisme, gerakan pembebasan kelompok identitas dan masyarakat asli atau masyarakat conform (*indigeneous people*), post-kolonialisme, globalisasi, post-nasionalisme, post-modernisme, dan post-strukturalisme yang mendekonstruksi struktur keamanan dalam masyarakat. Ada empat pendekatan Pendidikan Multikultural: (1) Pendekatan Kontributif; (2) Pendekatan Aditif; (3) Pendekatan Transformatif; dan, (4) Pendekatan Aksi Sosial. Pendidikan multikultural memiliki beberapa prinsip: (1) Materi pelajaran harus terbuka secara budaya; (2) Isi materi mengandung perbedaan dan persamaan; (3) Materi pelajaran sesuai dengan konteks waktu dan tempat; (4) Pengajaran menggambarkan berdasar pada pengalaman dan pengetahuan; dan, (5) Pendidikan memuat model belajar mengajar yang interaktif. Untuk tujuannya ada dua pendapat yang mendefinisikan; *Pertama*, menurut D.J. Skeel untuk peranan sekolah memandang keberadaan siswa, membantu siswa berlaku positif, memberikan ketahanan siswa dalam mengambil keputusan, dan membantu siswa membangun ketergantungan lintas budaya dan gambaran positif tentang perbedaan kelompok). *Kedua*, Abdullah Aly untuk sikap, pengetahuan, dan pembelajaran.

**Kata Kunci:** Pendidikan Multikultural dan Manifestasi Politik Kebhinekaan

### PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan masyarakat *majemuk*, hal ini dilihat dari realitas sosial yang ada. Bukti kemajemukannya dapat dipastikan melalui semboyan dalam negara Republik Indonesia (RI) "Bhineka Tunggal Ika". Masyarakat Indonesia yang berbentuk dilandasi oleh berbagai perbedaan, baik secara *horizontal* maupun *vertikal*. Perbedaan yang bersifat horizontal meliputi kesatuan-kesatuan social yang berdasarkan suku, ras, agama, dan bahasa. Sedangkan yang bersifat vertikal menyangkut perbedaan-perbedaan lapisan atas dan bawah yang menyangkut bidang ekonomi, social, politik, dan budaya.

Pendidikan merupakan suatu proses pengembangan sumber daya manusia (SDM) agar memperoleh kemampuan sosial dan perkembangan individu yang optimal memberikan

relasi yang kuat antara individu dengan masyarakat dan lingkungan budaya sekitarnya<sup>1</sup>. Lebih dari itu, pendidikan merupakan proses “memanusiakan manusia” dimana manusia diharapkan mampu memahami dirinya, orang lain, alam dan lingkungan budayanya. Atas dasar inilah pendidikan tidak terlepas dari budaya yang melingkupinya sebagai konsekwensi dari tujuan pendidikan yaitu mengasah rasa, karsa dan karya.

Pendidikan selalu menarik perhatian bagi semua kalangan, utamanya para *stakeholders* (pemangku kepentingan) pendidikan. Sebab, tema dan pendekatan yang dilakukan sangat beragam. Salah satunya adalah pendidikan dengan multikulturalisme yang melahirkan konsep pendidikan multikultural. Indonesia salah satunya, Negara yang pendidikan multikultural terbesar di dunia. Sekarang jumlah pulau yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekitar 13.000 pulau besar dan kecil, populasi penduduknya berjumlah sekitar 200 juta jiwa, dan 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda, serta menganut agama dan kepercayaan yang beragam (Islam, Katolik, Kristen Protestan, hindu, Budha, Konghucu, dan berbagai macam aliran kepercayaan).<sup>2</sup>

Sistem pendidikan di Indonesia yang setiap tahun berganti mengikuti jalur politik pemenang membuat ketidak konsistenan suatu Negara di dalam memajukan dunia pendidikan. Indonesia adalah salah satu Negara multikultural terbesar di dunia, kenyataan ini dapat di lihat kondisi dari sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Pendidikan multikultural berjalan bergandengan tangan dengan proses demokratisasi di dalam kehidupan masyarakat. Proses demokratisasi itu dipicu oleh pengakuan terhadap hak asasi manusia yang tidak membedakan perbedaan-perbedaan manusia atas warna kulit, agama dan gender.

Pada konteks pendidikan multikultural dapat memberikan kontribusi penting bagi pembentukan “kebhinnekaan” yang diikat “keikaan” yakni betul-betul aktual, tidak hanya sekedar slogan dan jargon dalam sebuah Negara yang berdasarkan pancasila. Namun tidak menutup kemungkinan adanya indikasi munculnya tarik ulur yang menimbulkan perdebatan panjang kalangan praktisi pendidikan ketika pendidikan multicultural difungsikan sebagai sintesis untuk mendialektikan antara ideologi personal (agama) dan ideologi komunal (negara).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Zahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Padang: Angkasa Raya, 1987), hlm. 7.

<sup>2</sup> Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural; Cross-cultural Understanding, Untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005), hlm. 4.

<sup>3</sup> Sulalah, *Pendidikan Multikultural: Didaktika Nilai-nilai Universitas Kebangsaan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 28.

Pendidikan multikultural merupakan gejala baru di dalam pergaulan umat manusia yang mendambakan persamaan hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang. Indonesia adalah negara yang terdiri atas pulau-pulau yang terpisah-pisah dan dibatasi oleh laut, sehingga Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya. Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” merupakan simbol yang mengartikan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beragam suku, adat, agama, bahasa dan kebudayaan yang menyertainya.

Apakah politik pendidikan kebhinnekaan tidak sejalan dengan kebijakan standarisasi nasional pendidikan? Standarisasi dimaksudkan untuk tolok ukur kualitas/mutu pendidikan agar tidak timbul kesenjangan atau disparitas antar daerah. Sekiranya standarisasi didasarkan pada “kompetensi”, sejatinya masih dimungkinkan “variasi” dalam muatan untuk mengakomodasi “lokalitas”. Sekedar contoh “kompetensi: mampu menghitung bilangan angka hingga 100”, yang dimungkinkan dalam proses disisipkan muatan bilangan 50 wajak + 50 bika = 100 buah makanan khas. Standarisasi tidak identik uniformisasi mutlak; ibarat orang diminta berseragam dengan motif kain yang sama, namun tetap juga dimungkinkan adanya keragaman dalam ukuran baju, model jahitan, dsb. Keragaman aspirasi, kebutuhan, dan karakteristik perlu diapresiasi dalam bingkai “simphoni” kebangsaan. Choirul Mahfud berpendapat, bahwa wacana pendidikan multikultural ini dimaksudkan untuk merespons fenomena konflik etnis, sosial, budaya yang kerap muncul ditengah-tengah masyarakat yang berwajah multikultural. Wajah multikultural di negeri ini hingga kini ibarat api dalam sekam, yang suatu saat bisa muncul akibat suhu politik, agama, sosial budaya yang memanas, yang memungkinkan konflik tersebut muncul kembali. Tentu penyebab konflik banyak sekali tetapi kebanyakan disebabkan oleh perbedaan politik, suku, agama, ras, etnis dan budaya.<sup>4</sup>

Pendidikan multikultural pada prinsipnya merupakan pendidikan yang menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural senantiasa menciptakan suatu proses di mana setiap kebudayaan bisa melakukan ekspresi. Akan tetapi tidak mudah untuk mendesain pendidikan multikultural secara praksis. Adapun melatarbelakangi adanya pendidikan multikultural adalah keberadaan masyarakat dengan individu-individu yang beragam latar belakang bahasa dan kebangsaan (*nationality*), suku (*race or ethnicity*), agama (*religion*), gender, dan kelas sosial (*social class*). Keragaman latar belakang individu dalam masyarakat tersebut berimplikasi pada keragaman latar belakang peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4.

<sup>5</sup> James A Banks (ed.), *Multicultural Education: Issues and Perspectives*, (London: Allynand Bacon Press. 1989), hlm. 14.

Pada konteks ini pendidikan multikultural merupakan pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan dan budaya masyarakat secara menyeluruh, sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 Pasal 4 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “*pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.*”<sup>6</sup>

## **PENDIDIKAN MULTIKULTURAL**

Pendidikan multikultural berasal dari dua kata, pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan dan cara-cara yang mendidik. Sedangkan Multikultural Secara etimologis *multi* diartikan “banyak, beragam dan aneka” dan kultural yang berasal dari kata *culture*<sup>7</sup> yang mempunyai makna “budaya, tradisi, kesopanan, atau pemeliharaan”, Secara sederhananya multikultural dapat diartikan “keanekaragaman budaya” dan sebagai pendidikan untuk *people of color*.<sup>8</sup> Pengertian tersebut juga hampir searah dengan yang diuraikan oleh Sleeter dalam G. Burnett, bahwa “*pendidikan multicultural adalah sekumpulan proses yang dilakukan oleh sekolah untuk menentang kelompok yang menindas.*”<sup>9</sup>

Pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural senantiasa menciptakan suatu proses di mana setiap kebudayaan bisa melakukan ekspresi. Akan tetapi tidak mudah untuk mendesain pendidikan multikultural secara praksis. Menurut Muhaimin el Ma’hady menjelaskan, bahwa pendidikan multikultural sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan

---

<sup>6</sup> UU RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Cemerlang, 2003), hlm. 8.

<sup>7</sup> Alo Liliweri M.S. (2003: 7-9), dalam bukunya “*Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*”, mengutip lebih dari lima makna kebudayaan. Pertama, menurut Iris Varner dan Linda Beamer, dalam *Intercultural Communication in the Global Workplace*, mengartikan kebudayaan sebagai pandangan yang koheren tentang sesuatu yang dipelajari, yang dibagi, atau yang dipertukarkan oleh sekelompok orang. Pandangan itu berisi apa yang mendasari kehidupan, apa yang menjadi derajat kepentingan, tentang sikap mereka yang tepat terhadap sesuatu, gambaran suatu perilaku yang harus diterima oleh sesama atau yang berkaitan dengan orang lain. Kedua, kebudayaan, dalam arti yang luas, adalah perilaku yang telah tertanam, ia merupakan totalitas dari sesuatu yang dipelajari manusia, akumulasi dari pengalaman yang dialihkan secara sosial (disosialisasikan), tidak sekedar sebuah catatan ringkas, tetapi dalam bentuk perilaku melalui pembelajaran sosial (Social Learning). Ketiga, kebudayaan adalah komunikasi simbolis, simbolisme itu adalah ketrampilan kelompok, pengetahuan, sikap, nilai, dan motif. Makna dari simbol-simbol itu dipelajari dan disebarluaskan dalam masyarakat melalui institusi. Untuk memperdalam tentang kebudayaan dan ruang lingkupnya lebih lanjut baca (T.O. Ihromi, 1996), (Van Peursen, 1985), (Achdiat M. Miharja, 1977), (Suwardi Endraswara, 2003), dsb.

<sup>8</sup> James A Banks, “*Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, And Practice*”, (Review of Research in Education, 1993), hlm. 3.

<sup>9</sup> Sleeter, dalam G. Burnett, *Varieties of Multicultural Education: an Introduction*, (Eric learinghouse on Urban Education, Digest: 1994), hlm. 1.

demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan (global). (Choirul Mahfud, 2009).<sup>10</sup>

Pendidikan multikultural merupakan proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak. Pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang “interkulturalisme” seusai Perang Dunia II. (Tilaar, 2002).<sup>11</sup> Kemunculan gagasan tersebut selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial juga meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara yang baru merdeka ke Amerika dan Eropa.

Mundzier Suparta (2008) mencatat lebih dari sepuluh definisi tentang pendidikan multikultural<sup>12</sup>, diantaranya :

- a. Pendidikan Multikultural adalah sebuah filosofi yang menekankan pada makna penting, legitimasi dan vitalitas keragaman etnik dan budaya dalam membentuk kehidupan individu, kelompok maupun bangsa.
- b. Pendidikan Multikultural adalah menginstitutionalkan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam system pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan (*equality*), saling menghormati dan menerima, memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial.
- c. Pendidikan Multikultural adalah sebuah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan atas nilai-nilai demokratis yang mendorong berkembangnya pluralisme budaya; dalam hampir seluruh bentuk komprehensifnya. Pendidikan multikultural merupakan sebuah komitmen untuk meraih persamaan pendidikan, mengembangkan kurikulum yang menumbuhkan pemahaman tentang kelompok-kelompok etnik dan memberangus praktik-praktek penindasan.
- d. Pendidikan Multikultural merupakan reformasi sekolah yang komprehensif dan pendidikan dasar untuk semua anak didik yang menentang semua bentuk diskriminasi

---

<sup>10</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 176.

<sup>11</sup> H.A.R Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2002).

<sup>12</sup> Mundzier Suparta, *Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas pendidikan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: Al Ghazali Center, 2008), hlm. 37.

dan intruksi yang menindas dan hubungan antar personal di dalam kelas dan memberikan prinsip-prinsip demokratis keadilan sosial.

Berdasarkan pengertian dari pendidikan multicultural yang diuraikan di atas dapat disimpulkan, bahwa kenyataannya bangsa Indonesia terdiri dari keragaman Agama, bahasa, suku, dan budaya. Indonesia banyak memiliki falsafah yang berbeda-beda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu bangsa Indonesia yang kuat, kokoh, damai, tentram, adil, makmur, sejahtera, dan dihargai oleh bangsa lain. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa tanpa membedakan etnik, ras, agama dan budaya. Seluruhnya harus bersatu membangun kekuatan di seluruh sektor, sehingga tercapai kemakmuran bersama, memiliki harga diri bangsa yang tinggi dan dihargai oleh bangsa lain.

## **SEJARAH PENDIDIKAN MULTIKULTURAL**

Pendidikan Multikultural merupakan sebuah konsep atau pemikiran yang tidak muncul dari ruang kosong, namun ada interes politik, sosial, ekonomi dan intelektual yang mendorong kemunculannya. Banyak lacakan sejarah atau asal-usul pendidikan multikultural yang merujuk pada gerakan sosial orang kelompok kulit berwarna lain yang mengalami praktik diskriminasi dari Lembaga-lembaga publik pada masa perjuangan Hak Asasi di Tahun 1960.

Pada tahun 1960-an, dianggap sebagai kemunculan lembaga sekolah yang berlandaskan Pendidikan Multikultural yang didirikan oleh para peneliti, dan aktivis pendidikan progresif. *James A. Bank* adalah salah satu seorang pioner dari Pendidikan Multikultural. Dia yang membumikan konsep Pendidikan Multikultural menjadi ide persamaan pendidikan. Pada pertengahan dan akhir 1980-an, muncul *Sleeter*, *Geneva Gay*, dan *Sonia Neito* yang memberikan wawasan lebih luas soal Pendidikan Multikultural. Memperdalam kerangka kerja yang membumikan ide persamaan pendidikan dan menghubungkannya dengan transformasi dan perubahan sosial.

Pandangan multikultural masyarakat Indonesia dalam praktik kenegaraan belum dijalani sebagaimana mestinya. Lambang “Bhinheka Tunggal Ika” yang bermakna keragaman dalam kesatuan ternyata yang ditekankan hanyalah kesatuannya dan mengabaikan keragaman budaya dan masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi pada masa orde baru yang menunjukkan relasi masyarakat terhadap praktek hidup kenegaraan tersebut, ternyata masyarakat Indonesia ingin menunjukkan identitasnya sebagai masyarakat bhineka yang selama Orde Baru telah ditindas dengan berbagai cara demi mencapai kesatuan bangsa. Demikian pula praksis pendidikan sejak kemerdekaan sampai era Orde Baru telah

mengabaikan kekayaan kebhinekaan kebudayaan Indonesia yang sebenarnya merupakan kekuatan dalam suatu kehidupan demokrasi.

Sejak lengsernya presiden Soeharto dari kekuasaannya, yang kemudian diikuti dengan masa yang disebut “era reformasi”, kebudayaan Indonesia cenderung mengalami “disintegrasikan”. Dalam pandangan Azyu Mardi Azra, bahwa krisis moneter, ekonomi, politik, dan agama bermula sejak akhir 1997 yang juga mengakibatkan terjadinya krisis multidimensi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>13</sup> Pada era reformasi, pendidikan masih dapat dikatakan belum memperoleh sistem terbaik dan masih hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Dengan kata lain, pendidikan multikultural belum dianggap penting walaupun realitas kultur dan agama sangat beraneka ragam.

Banyak konflik kekerasan, mulai dari antar individu, antar kelompok, antar kampung hingga antar suku, seperti di Madura, Lampung, dan Poso, yang disebabkan oleh persoalan tidak adanya pemahaman multikultural; keragaman dan kemajemukan kultur seringkali direspons dengan sikap dan perilaku monolog/monokultur (klaim kebenaran, klaim keselamatan, klaim memperadabkan). Sekedar contoh dari sikap tersebut, salah seorang dari tiga terpidana mati bom Bali (Amrozi cs) pernah berucap dengan lantang: “Selama 10 tahun di Madinah, Nabi Saw berhaji hanya satu kali dan umroh hanya tiga kali, tetapi beliau melakukan peperangan melawan orang kafir sebanyak 70 kali...Allahu Akbar”. Ironisnya, sikap dan perilaku demikian dibangun secara sistematis lewat dunia pendidikan, termasuk pendidikan agama, yang cenderung merekayasa manusia absolut, mutlak-mutlakan. Sebagaimana terungkap dalam hasil penelitian PPIM UIN Jakarta tahun 2001 lalu terhadap negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, termasuk Indonesia, bahwa semakin saleh seseorang, semakin ia tidak toleran. Tentu saja, dalam hal ini pendidikan, terutama pendidikan agama, berkontribusi besar atas terbentuknya “kesalehan” semacam itu. Perkembangan global (arus globalisasi) berdampak pada pertukaran budaya (*encounter with others*) berlangsung amat cepat, sehingga diperlukan pemahaman terhadap keragaman budaya (global) secara tepat.

Salah satu wujud pemahaman yang tidak tepat adalah proses mengglobalnya nilai-nilai budaya, gaya hidup, falsafah, dan institusi-institusi yang berasal dari Barat sebagai sumber globalisasi ke seluruh lini kehidupan masyarakat dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan hingga urusan selera “perut” dan “aurat” cenderung dimaknai sebagai proses penyeragaman dan pembaratan budaya. Akibatnya, seseorang tercerabut dari

---

<sup>13</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan...*, hlm. 81.

(tidak mengapresiasi) budaya sendiri. Bersamaan dengan ini, sebagian masyarakat menunjukkan sikap reaktif anti Barat dan menganggapnya sebagai musuh.

Sebagai sebuah gerakan, multikulturalisme baru mulai muncul sekitar tahun 1970-an pertama kali di Negara Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya. Setelah itu, diskursus multikulturalisme berkembang dengan sangat cepat. Setelah tiga decade sejak digulirkan, multikulturalisme sudah mengalami dua gelombang penting, yaitu; *Pertama*, multikulturalisme dalam konteks perjuangan pengakuan budaya yang berbeda. *Kedua*, adalah multikulturalisme yang melegitimasi keragaman budaya, yang mengalami beberapa tahapan, diantaranya: kebutuhan atas pengakuan, melibatkan berbagai disiplin akademik lain, pembebasan melawan imperealisme dan kolonialisme, gerakan pembebasan kelompok identitas dan masyarakat asli atau masyarakat conform (*indigeneous people*), post-kolonialisme, globalisasi, post-nasionalisme, post-modernisme, dan post-strukturalisme yang mendekonstruksi struktur kemapanan dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Menurut analisis Muhaemin el-Ma'hady sebagaimana yang dikutip Choirul Mahfud dalam bukunya "*Pendidikan Multikultural*", akar sejarah multikulturalisme bisa dilacak secara historis, bahwa sedikitnya selama tiga dasa warsa kebijakan yang sentralistis dan pengawalan yang ketat terhadap isu perbedaan telah menghilangkan kemampuan masyarakat untuk memikirkan, membicarakan, dan memecahkan persoalan yang muncul karena adanya perbedaan secara terbuka, rasional, dan damai.<sup>15</sup>

Kearifan tidak dapat dinilai sebagai positif-negatif dan tidak dapat dijelaskan melalui kacamata kebudayaan yang lain. Hal ini disebabkan oleh sudut pandang dan akar baik-buruk dari setiap kebudayaan mempunyai volume yang berbeda juga.

## **PENDEKATAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL**

Dalam mengkaji sebuah pendekatan, James A. Banks mengemukakan empat (4) pendekatan dalam pendidikan multicultural, yaitu:<sup>16</sup>

1. *Kontributif*, ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara menyeleksi buku-buku teks wajib atau anjuran dan aktivitas-aktivitas tertentu, seperti hari-hari besar kenegaraan dan keagamaan dari berbagai kebudayaan.
2. *Aditif*, merupakan bentuk penambahan muatan-muatan, tema-tema, dan perspektif-perspektif kedalam kurikulum tanpa mengubah struktur dasarnya.

---

<sup>14</sup> Lihat <http://curuk-sinobi.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-multikulturalisme-sejarah.html?m=1>, diakses pada tanggal 17/11/2016.

<sup>15</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan...*, hlm. 87.

<sup>16</sup> Sulalah, *Pendidikan Multikultural: Didaktika Nilai-nilai Universitas Kebangsaan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 126-127.

3. *Transformatif*, mengembangkan suatu paradigma baru bagi kurikulum atau membuat kurikulum baru dimana konsep-konsep, isu-isu, tema-tema, dan problem-problem didekati dengan pendekatan *muqaran* (perbandingan) untuk memperbaharui pemahaman dan berbagai perspektif serta sudut pandang.
4. *Aksi Sosial*, mengkombinasikan pendekatan transformatif dengan berbagai aktivitas untuk melakukan perubahan social.

### **TUJUAN DAN PRINSIP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL**

Secara Konseptual, pendidikan multikultural menurut Gorsky mempunyai tujuan dan prinsip, berikut tujuan-tujuannya:<sup>17</sup>

1. Setiap siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi mereka;
2. Siswa belajar bagaimana belajar dan berpikir secara kritis;
3. Mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan, dengan menghadirkan pengalaman–pengalaman mereka dalam konteks belajar;
4. Mengakomodasikan semua gaya belajar siswa;
5. Mengapresiasi kontribusi dari kelompok– kelompok yang berbeda;
6. Mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai latar belakang yang berbeda;
7. Untuk menjadi warga negara yang baik di sekolah maupun di masyarakat;
8. Belajar bagaimana menilai pengetahuan dari perspektif yang berbeda;
9. Untuk mengembangkan identitas etnis, nasional dan global;
10. Mengembangkan ketrampilanketrampilan mengambil keputusan dan analisis secara kritis sehingga siswa dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam kehidupan sehari–hari.

Adapun prinsip–prinsipnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opini–opini yang berlawanan dan interpretasi–interpretasi yang berbeda;
2. Isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok;
3. Materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat;
4. Pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas;

---

<sup>17</sup> Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma pendidikan Universal di Era Modern dan Post-Modernisme*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2004), hlm. 306.

5. Pendidikan hendaknya memuat model belajar mengajar yang interaktif agar supaya mudah dipahami.

Skeel (1995) mendefinisikan tujuan pendidikan dengan berbasis multikultural dapat diidentifikasi sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam;
2. Untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan;
3. Untuk memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya;
4. Untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok.

Abdullah Aly (2005) menguraikan, tujuan pendidikan multikultural dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:<sup>19</sup>

1. Sikap (*attitudinal goals*), adalah untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultural, toleransi kultural, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsif terhadap budaya, keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik.
2. Pengetahuan (*cognitive goals*), adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain, dan kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural, dan pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural.
3. Pembelajaran (*instructional goals*), adalah untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran; memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan alat-alat konseptual untuk komunikasi antar budaya; mengembangkan keterampilan interpersonal; memberikan teknik-teknik evaluasi; membantu klarifikasi nilai; dan menjelaskan dinamika kultural.

Dari uraian-uraian mengenai tujuan pendidikan multikultural tersebut diatas dapatlah dipahami bahwa tujuan pendidikan multikultural ini adalah dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang serba majemuk.

## **SIMPULAN**

---

<sup>18</sup> D.J. Skeel, *Elementary Social Studies: Challenge for Tomorrow's World*, (New York: Harcourt Brace College Publishers, 1995), hlm. 76.

<sup>19</sup> Abdullah Aly, "Pendidikan Multikultural dalam Tinjauan Pedagogik" dalam *Makalah Seminar Pendidikan Multikultural sebagai Seni Mengelola Keragaman*, (Surakarta: Fak. Ekonomi UMS, Tanggal 8 Januari 2005), hlm. 349.

Pendidikan Multikultural (PM) terkandung dalam pasal 4 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang menyebutkan “pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”. Lahirnya UU ini menunjukkan bahwasanya pemerintah telah memiliki political will dalam merengkuh kemajemukan bangsa melalui pendidikan. Hanya saja dlm praktiknya, pemerintah acapkali “tidak hadir” atau mengambil langkah “reaktif” ketika terjadi konflik di masyarakat

Pemerintah telah memiliki “*political will*” untuk merespons realitas multikultural bangsa melalui serangkaian kebijakan proaktif, yakni kebijakan yang dirancang dan dipersiapkan untuk membangun keragaman sosio-kultural dalam bingkai persatuan dan kesatuan agar tercipta kehidupan yang harmonis dan berkeadilan.

Pendidikan multikultural diperlukan bangsa Indonesia untuk mengurangi terjadinya konflik horisontal antar masyarakat, baik karena perbedaan kultur, suku, adat, maupun agama. Pendidikan multikultural menekankan pada pembelajaran yang menghargai perbedaan, karena perbedaan itu merupakan hukum alam yang harus dihadapi bukan menjadi sumber perpecahan umat manusia. Pendidikan multikultur di Indonesia memang masih mencari bentuknya yang tepat dan efektif yang akan mencerahkan bagi semua peserta didik di Indonesia.

Pendidikan agama yang sering dituduh paling bertanggungjawab terhadap berbagai konflik yang banyak terjadi sebagai akumulasi perbedaan yang cukup tajam di Indonesia harus mampu menampilkan diri sebagai satu pembelajaran yang berwawasan multikultural. Hal ini dapat dilakukan melalui pilihan materi yang cocok atau bernuansa toleransi terhadap semua manusia. Dengan kata lain pendidikan agama mampu tampil atau menampilkan diri secara inklusif dalam bingkai kebersamaan meski jelas berbeda serta tidak menekankan perbedaan yang ada karena memang berbeda atau bahkan terjadi pembedaan karena semangat ideologi kelompok. Dengan demikian diperlukan pemahaman yang komprehensif dan integral terhadap substansi materi pendidikan agama serta cara pembelajaran yang efektif agar tercapai tujuan pendidikan yang bernuansa multikultur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aly, Abdullah, “*Pendidikan Multikultural dalam Tinjauan Pedagogik*” dalam Makalah “*Seminar Pendidikan Multikultural sebagai Seni Mengelola Keragaman*”, Surakarta: Fak. Ekonomi UMS, 2005.
- Bank, James A. (ed.), *Multicultural Education: Issues and Perspectives*, London: Allynand Bacon Press, 1989.

- \_\_\_\_\_, “*Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, And Practice*”, *Review of Research in Education*, 1993.
- Burnett, G, *Varieties of Multicultural Education: an Introduction*, Eric learinghouse on Urban Education, Digest, 1994.
- <http://curuk-sinobi.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-multikulturalisme-sejarah.html?m=1>.
- Idris, Zahara, *Dasar-dasar Kependidikan*, Padang: Angkasa Raya, 1987.
- Mahfud, Chirul, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Maksum, Ali dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma pendidikan Universal di Era Modern dan Post-Modernisme*, Yogyakarta: IRCiSod, 2004.
- M.S, Alo Liliweri, 2003, dalam bukunya “*Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*”,
- Skeel, D.J, *Elementary Social Studies: Challenge for Tomorrow’s World*, New York: Harcount Brce College Publishers, 1995.
- Sulalah, *Pendidikan Multikultural: Didaktika Nilai-nilai Universitas Kebangsaan*, Malang: UIN-Maliki Press, 2012.
- Suparta, Mundzier, *Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas pendidikan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: Al Ghazali Center, 2008.
- Tilaar, H.A.R, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- UU RI Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Cemerlang.
- Yaqin, Ainul, *Pendidikan Multikultural; Cross-cultural Understanding, Untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005.